

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Mekanisme Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Definisi Peningkatan Mutu

Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal saling bekerja sesuai mesin. Jadi jika yang satu bekerja maka akan diikuti oleh yang lainnya. Juga diartikan sebagai cara kerja dalam organisasi.²⁴ Peningkatan memiliki kata dasar tingkat mendapat imbuhan pe-an sehingga menjadi peningkatan yang berupa kata benda dengan arti proses, cara, perbuatan, meningkatkan sesuatu.²⁵ Definisi mutu memiliki variasi sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing orang atau pihak. Produsen (penyedia barang/jasa) atau konsumen (pengguna/pemakai barang/jasa) akan memiliki definisi yang berbeda mengenai mutu barang/jasa. Satu kata yang menjadi benang merah dalam konsep mutu baik menurut produsen atau konsumen adalah kepuasan. Barang atau jasa yang dikatakan bermutu adalah yang dapat memberikan kepuasan baik bagi pelanggan maupun produsennya.

²⁴ Departemen Pendidikan, Kamus Besar..., 121..

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), Edisi keempat, 677.

Selanjutnya konsep mutu menurut beberapa ahli adalah:²⁶

- 1) Menurut Juran, kualitas produk adalah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan itu didasarkan atas lima ciri utama berikut: (a) Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan, (b) Psikologis, yaitu citra rasa atau status, (c) Waktu, yaitu kehandalan, (d) Kontraktual, yaitu adanya jaminan, (e) Etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur.
- 2) Menurut Crosby, kualitas adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standart kualitas yang telah ditentukan. Standart kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi.
- 3) Menurut Deming, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atau suatu produk yang akan dihasilkan.
- 4) Menurut Feigenbaum, kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.

²⁶ M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015),1-2.

5) Menurut Garvin dan Davis, kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Secara tegas Deming menekankan pentingnya pencegahan daripada memperbaiki kerusakan, hal inilah yang dianggap sebagai kontribusi unik dalam memahami bagaimana menjamin peningkatan mutu.

Definisi mutu menurut Goetsch Davis “mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.²⁷ Mutu bukan hanya menekankan pada hasil akhir, yaitu produk dan jasa akan tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan. Sangatlah mustahil dapat menghasilkan produk dan jasa yang bermutu tanpa melalui manusia dan proses yang bermutu.

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Sallis mendefinisikan mutu dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut berarti mutu yang tidak dapat ditawar-tawar atau bersifat mutlak. Sedangkan mutu relatif adalah mutu yang ditetapkan oleh selera konsumen.

²⁷ Zulian Yamit, *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*, (Yogyakarta: Ekonisia, Cetakan Keempat, 2005), 8.

Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa mekanisme mutu pendidikan adalah cara kerja di lembaga pendidikan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan nonakademis/ekstrakurikuler. Pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

Mutu pendidikan bukan ditentukan dari lembaga penyelenggara pendidikan tetapi mutu pendidikan adalah spesifikasi yang dikehendaki dan kesesuaian dengan apa yang menjadi pandangan serta harapan masyarakat, dengan mengoptimalkan keseluruhan penunjang mutu pendidikan, yaitu input, proses, sehingga akan menghasilkan kualitas output mutu pendidikan yang tinggi. Indikator sekolah bermutu dari perspektif *service provider* adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk sebagai berikut: (1) Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau *conformance to specification*, (2) Sesuai dengan penggunaan atau *fitness for purpose or use*, (3) Produk tanpa cacat atau *zero defect*, (4) Sekali benar dan seterusnya atau *right first every time*.

Dalam konteks pendidikan nasional maka keempat indikator mutu tersebut diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar penilaian pendidikan. Sedangkan indikator mutu pendidikan menurut

spesifikasi *costemer* ialah: (1) Kepuasan pelanggan bila produk dan jasa memenuhi harapan pelanggan, (2) Setia kepada pelanggan bila produk dan jasa memenuhi harapan pelanggan.

Sesuai dengan konsep bahwa pendidikan adalah layanan jasa, maka indikator kepuasan pengguna dapat dilihat dari penampilan, respons, handal, keyakinan, dan empati. Indikator peningkatan mutu pendidikan di madrasah dilihat pada setiap komponen pendidikan antara lain: mutu lulusan, kualitas guru, kepala madrasah, pengelolaan madrasah, staf madrasah, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, implementasi kurikulum, sistem penilaian, dan komponen lainnya. Ini berarti melalui pengawasan harus terlihat dampaknya terhadap kinerja madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengawas madrasah harus menjadi bagian integral dalam meningkatkan mutu pendidikan agar bersama guru, kepala madrasah, staf madrasah, dan lain sebagainya berkolaborasi membina dan mengembangkan mutu pendidikan di madrasah yang bersangkutan seoptimal mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²⁸

b. Indikator Mutu Pendidikan

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan, misalnya tes tertulis, anekdot, skala sikap.²⁹ Dalam konteks pendidikan, indikator mutu

²⁸ Undang-Undang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Menteri no 19, Tahun 2011.

²⁹ Nurhasan, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21; Indikator Cara Mengukur dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan*, (Bandung: Sindo, 1994), 390.

berpedoman pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh madrasah pada kurun waktu tertentu. Sedangkan prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes akademik atau prestasi non akademik.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu

Dalam peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh input dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya madrasah yang terdiri dari man, money, dan *policy*.³⁰

Dari pengertian di atas maka input pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi mutu dapat berupa:³¹

- 1) Sumber daya manusia sebagai pengelola madrasah terdiri dari:
 - (a) Kepala madrasah merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala., (b) guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, (c) Tenaga Kependidikan.
- 2) Sarana Prasarana

Sarana prasarana pendidikan merupakan media belajar atau alat bantu yang pada hakikatnya akan lebih mengefektifkan

³⁰ Subagio Admodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizya Jaya. 2002), 22.

³¹ Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 22.

komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

3) Kesiswaan

Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Penerimaan siswa berdasarkan pada kriteria yang jelas transparan dan akuntabel

4) Pembiayaan

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah pembiayaan pendidikan yang memadai. Madrasah harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu pembiayaan harus dikelola secara transparan.

Sebuah sistem pendidikan meniscayakan adanya sebuah evaluasi guna mengontrol kinerja suatu satuan pendidikan, sehingga dengan adanya fungsi kontrol tersebut tingkat efektivitas, produktivitas, berhasil dan gagalnya sistem pendidikan dapat dipantau.³²

Baik dalam pencapaian mutu maupun pembiayaan pendidikan, mutlak diperlukan kontrol atau pengawasan yang terus menerus oleh pihak-pihak yang brwenang. Dengan pengawasan yang baik

³² Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005, Ban XII, Pasal 78.

akan membantu keberlangsungan keberhasilan suatu lembaga pendidikan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kita perlu melakukan kajian terhadap rencana dan pelaksanaan yang terkait dengan peningkatan kualitas untuk upaya memberikan bimbingan kepada peserta didik baik di bidang akademik maupun non akademik.

e. Pengertian Pendidikan

Pendidikan diartikan/didefinisikan orang berbeda-beda. Menurut Dictionari of Education, pendidikan diartikan:³³

- 1) Serangkaian proses seseorang/anak mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk lainnya yang bernilai/berguna di masyarakat.
- 2) Proses sosial dimana orang-orang atau anak-anak dipengaruhi dengan lingkungan yang (sengaja) dipilih dan dikendalikan, sehingga mereka memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal.

Beberapa ahli mengartikan pendidikan sebagai berikut:³⁴

- 1) Langaveld: mendidik adalah mempengaruhi anak dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa. Pendidikan hanya terdapat dalam pergaulan yang disengaja antara orang dewasa dengan anak dan diarahkan kepada tujuan pendidikan.

³³ Sofan Amri, *Peningkatan Mutu ...*, 5.

³⁴ Sofan Amri, *Peningkatan Mutu...*, 5.

- 2) Hoogveld: mendidik adalah membantu anak supaya cakap dalam menyelenggarakan tugas hidupnya atau tanggung jawabnya sendiri.
- 3) SA. Branata, dkk: pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya dalam mencapai kedewasaannya.
- 4) Ki hajar Dewantara, “Mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencaapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.”

Pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan (idealitas). Tujuan pendidikan adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsu, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya.³⁵ Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas,

³⁵ Darda Syahrizal, Adi Sugiarto, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Aplikasinya*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2013), 6-7.

individualitas, sosialitas dan berbudaya secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.

Berdasarkan pengertian pendidikan yang dikemukakan para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa untuk membantu atau membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak/peserta didik secara teratur dan sistematis ke arah kedewasaan.

f. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Berbagai negara di dunia tidak pernah surut melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan. Kecenderungan internasional mengisyaratkan bahwa sistem peningkatan mutu pendidikan dibangun dari unit satuan pendidikan di mana kelompok pendidik dan tenaga kependidikan profesional menunjukkan komitmen dan praktik-praktik yang terbaik (*akuntabilitas profesional*).³⁶

Pada kenyataannya menunjukkan bahwa peningkatan mutu tidak selalu berkaitan dengan peningkatan anggaran pendidikan dan ketersediaan guru dalam jumlah dan kualifikasi. Peningkatan mutu terjadi dalam perwujudan budaya mutu yang menunjukkan perubahan cara berfikir dan budaya kerja yang mengutamakan mutu.

Perhatian pemerintah (Indonesia) terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional direfleksikan dalam berbagai kebijakan

³⁶ Sofan Amri, *Peningkatan Mutu ...*, 32.

pembangunan pendidikan yang secara sistematis telah lama dilakukan sejak rencana pembangunan lima tahun pertama. Berbagai program inovasi pendidikan baik yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan proyek maupun rutin pada kenyataannya belum menunjukkan hasil pencapaian mutu pendidikan yang mampu membangun daya saing bangsa.³⁷

Indikator-indikator kajian internasional maupun regional dalam banyak aspek selalu menunjukkan bahwa daya saing Indonesia menduduki peringkat yang belum memberikan kebanggaan sebagai bangsa. Dengan mempertimbangkan peranan strategis dalam investasi pendidikan sumber daya manusia, diyakini bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bermutu akan mampu secara bertahap membangun martabat dan daya saing bangsa Indonesia. Satu sistem penjaminan dan peningkatan mutu diperlukan untuk menghindari pelaksanaan program-program pendidikan yang parsial, tidak berkelanjutan, serta belum kuatnya tata kerja akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerjasama yang optimal dari semua komponen yang terlibat didalamnya, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, keluarga dan peserta didik sendiri. Upaya pemerintah tidak akan dapat berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari pihak lain yang kompeten. Madrasah

³⁷ *Ibid.*, 32.

yang maju akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke madrasah tersebut.

g. Minat

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertatik pada sesuatu objek atau menyenangkan sesuatu objek.³⁸ Menurut Crow and Crow minat adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi perhatian terhadap orang, sesuatu, aktivitas-aktivitas tertentu.³⁹ Berdasarkan pendapat Crow and Crow dapat diambil pengertian bahwa individu yang mempunyai minat terhadap belajar, maka akan terdorong untuk memberikan perhatian terhadap Belajar tersebut.

Ahli lain mengatakan bahwa minat sebagai sesuatu hasil pengalaman yang tumbuh pada dan dianggap bernilai oleh individu adalah kekuatan yang mendorong seseorang itu untuk berbuat sesuatu.⁴⁰

Jadi pengalaman yang dianggap bernilai merupakan faktor yang turut membuat minat pada diri individu. Pengalaman memberikan motivasi serta kekuatan pada diri individu untuk melakukan sesuatu.

Kesadaran yang menyebabkan timbulnya perhatian itulah yang disebut minat. Berdasarkan pengertian di muka maka unsur minat adalah perhatian, rasa senang, harapan dan pengalaman.

³⁸ Suryabrata Sumadi, *Teori-Teori Kepribadian*, (Bandung: P.T Eresco, 1988), 109.

³⁹ Sugiyono, *Psikologi Pendidikan*. (Jakarta : Aksara Baru 2006), 26.

⁴⁰ Surachmad Winarno, *Teori-Teori Belajar Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 1980), 90.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Menurut Crow and Crow, ada tiga faktor yang menimbulkan minat yaitu “Faktor yang timbul dari dalam diri individu, faktor motif sosial dan faktor emosional yang ketiganya mendorong timbulnya.”⁴¹ Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Sudarsono, faktor-faktor yang menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.
2. Faktor motif sosial, Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana ia berada.
3. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek⁴²

Jadi berdasarkan dua pendapat diatas faktor yang menimbulkan minat ada tiga yaitu dorongan dari diri individu, dorongan sosial dan motif dan dorongan emosional. Timbulnya minat pada diri individu berasal dari individu, selanjutnya individu mengadakan interaksi dengan lingkungannya yang menimbulkan dorongan sosial dan dorongan emosional.

⁴¹ Heri, P., *Pengantar Perilaku Manusia*. (Jakarta : EGC. Witherington, H. C. 1999), 72.

⁴² Sugiyono, *Psikologi Pendidikan*, 55.

Minat kemudian mulai memberikan daya tarik yang ada atau ada pengalaman yang menyenangkan dengan hal-hal tersebut. Secara skematis proses terbentuknya minat dapat digambarkan sebagai berikut :⁴³



Gambar 1 : Proses terbentuknya minat

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, jika pekerjaan tidak jelas dan tidak menentu, makin sulit suatu tugas makin besar minat dan tenaga untuk menyelesaikan tugas itu, pekerjaan yang dilakukan secara cepat dan bersama-sama dapat menumbuhkan minat.

2. Manajemen Pembiayaan

a. Definisi Manajemen Pembiayaan

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang melakukan manajemen. Akhirnya, *management*

⁴³ Sugiyono, Psikologi Pendidikan, 56.

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.⁴⁴

Manajemen adalah kegiatan yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengendalian (controlling) biasa disingkat POAC.⁴⁵ Manajemen berupa mengkoordinasikan semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif. Proses kerja dengan dan melalui (memberdayakan) orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Oleh karena itu, definisinya merupakan proses terdiri atas kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama (administrasi) secara efisien.⁴⁶

Berdasarkan pendapat para ahli manajemen di atas penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu rangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan.

Dari sekian sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia yang hidup dan matinya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuh.⁴⁷

⁴⁴ Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. 2, 4.

⁴⁵ Departemen Pendidikan. *Kamus Besar...*, 408.

⁴⁶ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi menuju Desentralisasi*, (Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2006), Cet. 2, 39.

⁴⁷ Tim Dosen, *Manajemen Pendidikan...*, 255.

Dalam pengertian sehari-hari istilah pembiayaan berasal dari kata *finance* dikaitkan dengan usaha memperoleh modal untuk membiayai aktifitas yang dilakukan. Namun pengertian pembiayaan itu diperluas, dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal, melainkan mencakup dimensi penggunaan modal. Perluasan pengertian itu sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi yang langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin.⁴⁸ Pengertian lain pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar siswa, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, kegiatan ekstrakurikuler siswa dan pengadaan buku pelajaran.⁴⁹

Dari definisi di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang mengatur keuangan madrasah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan madrasah dengan pengendalian atas fungsi manajemen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

b. Sumber Pembiayaan Madrasah

Pada tingkat sekolah, biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejauh tercatat dalam

⁴⁸ Harbangan Siagian, *Administrasi Pendidikan*, (Semarang: Setya Wacana, 1989), 130.

⁴⁹ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan...*, 64.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan. Sumbangan dapat diberikan secara insidental guna menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan pemerintah dapat diberikan berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua pengeluaran rutin sekolah.⁵⁰ Jadi pendapatan madrasah selain bersumber dari pemerintah, juga berasal dari orang tua siswa, bantuan luar negeri dan sumbangan sukarela atau donatur.

c. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Madrasah

Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi dengan efektif dan transparan. Berdasarkan berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah mencakup tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan penjelasan dari konsep manajemen pembiayaan (POAC) di lembaga pendidikan formal dapat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

⁵⁰ Harbangan Siagian, *Administrasi Pendidikan...*, 133.

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan (*planning*) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin.⁵¹ Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk mengatur pemakaian sumber daya pada masa yang akan datang.⁵² Anggaran sering kali dimaknai sebagai suatu rencana, namun dalam bidang manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan sering disebut dengan RAPBM. Ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan. Anggaran berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian kegiatan. Perencanaan dicakup oleh anggaran dan pelaksanaannya

⁵¹ Daryanto, M. Farid, *Konsep Dasar...*, 162.

⁵² Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 4.

diatur oleh anggaran tersebut.⁵³ Biaya pendidikan pada umumnya diartikan sebagai pengeluaran sejumlah uang untuk membiayai pendidikan. Investasi merupakan pengorbanan sejumlah nilai tertentu saat ini untuk memperoleh nilai (pengembalian) mendatang yang tentunya dengan harapan lebih besar dari nilai saat ini. Biaya investasi sekolah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, biaya personal meliputi segala macam pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh siswa sekolah, antara lain SPP (*tuition fee*) dan biaya praktikum, agar dapat mengikuti pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasional sekolah meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya investasi meliputi penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasional mencakup tiga komponen, yaitu: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; dan (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai (boardmarker/kapur, penghapus, tinta, kertas tik dan sebagainya); (3) dan biaya operasional pendidikan tidak langsung yakni biaya pemeliharaan sarana dan

⁵³ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. keduabelas, 192.

prasarana, uang lembur, transportasi, air, jasa, daya listrik, telekomunikasi, asuransi dan sebagainya.⁵⁴

Kaitannya dalam penyusunan anggaran adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang maka kehidupan madrasah akan menjadi efektif dan efisien dalam hal pembiayaan, sehingga sentralisasi pengelolaan pembiayaan perlu difokuskan pada bendaharawan madrasah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggungjawaban pembiayaan.

Penulis menyimpulkan bahwa anggaran ialah suatu rencana yang berisi jumlah uang yang dimiliki untuk membiayai kegiatan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut: (a) Pada tingkat kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri para pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan biaya selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan, (b) Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu diadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan

⁵⁴ Undang Undang Nomo nomor 20, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2003).

dengan pengembangan RAPBM, (c) Sosialisasi dan legalitas setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.⁵⁵

2) Pengorganisasian (Organizing)

George R. Terry dalam Daryanto mengemukakan bahwa ;

”pengorganisasian adalah tindakan menusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.”⁵⁶

Dapat dipahami bahwa pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya.

2) Pelaksanaan (*actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama.

⁵⁵ Departemen Agama, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Bandung: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Sekolah, 2003), 116-119.

⁵⁶ Daryanto dan M. Farid, *Konsep dasar...*, 164-165

Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam lembaga madrasah.⁵⁷

Dari pengertian di atas pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk merealisasikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni penerimaan pengeluaran dan evaluasi/pertanggungjawaban.

a) Penerimaan

Penerimaan pembiayaan madrasah dari sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Prosedur pembukuan penerimaan pembiayaan madrasah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tampaknya menganut pola panduan antara pengaturan pemerintah pusat dan madrasah. Artinya terdapat beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah

⁵⁷ Daryanto dan M. Farid, Konsep dasar ..., 165-166.

yang intinya pihak madrasah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya, dan madrasah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat makro kelembagaan.

Namun demikian, sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dengan pengembangan konsep manajemen berbasis sekolah, maka sekolah/madrasah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar dalam kaitannya dengan manajemen pembiayaan untuk mencapai efektifitas pencapaian tujuan sekola/madrasah.

b) Pengeluaran

Pengeluaran madrasah berhubungan dengan pembayaran pembiayaan sekolah untuk pembelian sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan perlengkapan dan fasilitas. Dalam manajemen pembiayaan madrasah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh peraturan.

Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan, meliputi format buku kas harian, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran pembiayaan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya. Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan pembiayaan

madrasah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala madrasah. Kepala madrasah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administratif.

c) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam waktu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. T. Hani Handoko (1995) dalam Daryanto mengemukakan definisi pengawasan yang didalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan bahwa,

“pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya lembaga madrasah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan madrasah.⁵⁸

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan, dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

⁵⁸ Daryanto dan M. Farid, Konsep Dasar..., 167.

Dalam perspektif persekolahan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen yang pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimanapun sekolah merupakan suatu sistem yang didalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya akan mnghasilkan kesemrawutan lajunya oorgniisasi, yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengarahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dan pengawasan secara berkelanjutan.

Pertanggungjawaban pembiayaan sekolah dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada: (1) Kepala Kanwil Departemen Agama, (2) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), (3) Kantor Departemen Agama Setempat.

Pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan setiap bulan kepada pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketentuan waktu.⁵⁹

Dengan demikian penulis simpulkan bahwa pelaksanaan manajemen pembiayaan di madrasah akan berjalan dengan lancar bila pengelolaan pembiayaan ditangani oleh seseorang yang benar-benar mengerti dan memiliki keahlian dalam pengelolaan pembiayaan sekolah.

d. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Agar masyarakat memahami program BOS dengan benar, maka dalam bab ini akan diuraikan tentang definisi tentang program BOS.

- 1) Pengertian Dana BOS. Pengertian BOS ialah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun.⁶⁰ Dengan demikian hakikat program BOS ialah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang berkualitas tinggi. Melalui program BOS, maka setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas, (b) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin

⁵⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis...*, 201-206.

⁶⁰ Depdiknas dan Kemenag, *Buku Panduan BOS dan BOS* buku, 2014, 2.

putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran, (c) Anak lulusan sekolah setingkat MI, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke tingkat MTs/setara, (c) Kepala madrasah penanggungjawab dan mengajak siswa MI yang akan lulus dan berpotensi melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi demikian pula bila teridentifikasi ada anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah, (d) Kepala sekolah dalam mengelola dana BOS harus transparan dan akuntabel dan BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua siswa, memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah, tetapi hal itu harus diputuskan bersama dengan komite madrasah dan orang tua siswa.

2) Tujuan dan Sasaran Dana BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program belajar 9 tahun yang bermutu, secara khusus program BOS bertujuan :⁶¹

- a) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan beban biaya operasional sekolah.
- b) Menggratiskan sekolah SD/MI dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Bertaraf Internasional (SBI).
- c) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran BOS ialah “semua sekolah SD/MI dan SMP, termasuk Sekolah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan

^{61 61} Mulyono, *Konsep Pembiayaan...*, 191-192.

Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia sedangkan program kejar paket A dan B tidak mendapat bantuan dana BOS karena sudah dibiayai oleh pemerintah”.

3) Landasan Hukum Dana BOS

Dalam pelaksanaan program BOS baik sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang menerima dana BOS harus mengetahui peraturan Undang-undang yang berkaitan, di antaranya : (a) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, (b) Undang-undang Dasar No 17 Tahun 1965 tentang pembentukan badan pemeriksa keuangan, (c) Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, (d) Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (e) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Undang-undang No 14 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara. (f) Undang-undang NO 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Bila melihat perundang-undangan di atas, bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menggarap program BOS yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang berkualitas tinggi supaya berjalan sesuai dengan tujuan dan tetap sasaran.

4) Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAM/RAPBM, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah yang diterima oleh sekolah. Dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:⁶² (a) Pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, (b) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi dipergustakaan, pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, olahraga, kesenian karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan untuk honor tambahan di luar jam pelajaran dalam arti honor les biaya transportasi, dan akomodasi guru/siswa dalam rangka mengikuti lomba, (c) Pembiayaan ulangan harian, umum, ujian madrasah, dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk foto copy, honor koreksi ujian dan honor dalam rangka penyusunan rapor siswa, (d) Pembelian bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis atau spidol, pensil, kertas, bahan praktikum buku-buku siswa, buku inventaris, langganan koran, majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk

⁶² ⁶² Depdiknas dan Kemenag, *Buku Panduann ...*, 4-5.

kebutuhan sehari-hari, (e) Pembiayaan perawatan madrasah yaitu pengecatan, perbaikan semua gedung madrasah, dan perbaikan fasilitas madrasah, (f) Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS, (g) Pengembangan profesi keguruan seperti pelatihan dan pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transpor dari dan ke madrasah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris madrasah.

5) Pengawasan dan Sangsi Dana BOS

Pengawasan dana BOS adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan pemborosan keuangan negara. Pengawasan dana BOS meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya peneliti akan bahas satu-persatu yaitu: (a) Pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya, (b) Pengawasan fungsional internal. Instansi pengawasan fungsional yang melakukan pengawasan fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal adalah inspektorat jenderal Depdiknas serta badan pengawasan daerah

(Bawasda) provinsi dan kabupaten atau kota, instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit, (c) Pengawasan eksternal. Instansi Pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) instansi ini bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.⁶³ Sangsi penyalahgunaan dana BOS sangatlah fatal karena pemerintah bertindak tegas dalam hal ini, pemblokiran sementara bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kabupaten atau Kota dan, bila mana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan. Secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.⁶⁴ Dengan adanya yang sangsi yang tegas dari pemerintah diharapkan sekolah penerima dana BOS tidak menyalahgunakan dana untuk kepentingan lain.

⁶³ Depdiknas dan Kemenag, *Buku Pedoman ...*, 7.

⁶⁴ Mulyono M.A, *Konsep Pembiayaan ...*, 202-205.

3. Tindak lanjut Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Pembiayaan

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka memerlukan partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan.

Hakekat tujuan institusi pendidikan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan dan dalam *Total Quality Management* (TQM) kepuasan pelanggan ditentukan oleh *stakeholder* lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena hanya dengan memahami proses dan kepuasan pelanggan maka lembaga pendidikan dapat menyadari dan menghargai kualitas. Semua usaha / manajemen dalam TQM harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan, apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dituntut agar dapat mengembangkan setiap warga yang siap memasuki era globalisasi yang penuh tantangan menghasilkan manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Dalam hubungan ini berbagai program pendidikan yang mengacu kepada tema pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan, meskipun sampai saat ini masih banyak

permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian.⁶⁵ Keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu merupakan tantangan bagi sekolah. Keberhasilan madrasah membentuk opini yang positif masyarakat bahwa proses dan hasil pembelajaran di madrasah itu bermutu merupakan indikasi bahwa madrasah itu telah berhasil memuaskan pelanggannya.

Dalam kenyataannya tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu. Sekolah yang melakukan proses yang bermutu akan memuaskan orang tua peserta didik. Sebaliknya semua sekolah melakukan hal yang sama sehingga bukan orang tua saja yang terpuaskan, tetapi juga akan meningkatkan jumlah siswa berprestasi sehingga memudahkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat mencapai tujuan dan dapat memuaskan seluruh masyarakat yang memanfaatkan jasa sekolah itu.⁶⁶ Pendidikan yang hasilnya dapat dilihat dikemudian hari perlu mendapat pembiayaan yang memadai, pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga.⁶⁷ Oleh karena itu sekolah perlu memperhatikan 3 komponen penentu keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang membutuhkan perhatian pengalokasian dana antara lain:

⁶⁵ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan...*, 92-93.

⁶⁶ Suti, Marus, "Strategi Peningkatan Mutu Diera Otonomi Pendidikan", *Jurnal Metdek*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2011.

⁶⁷ Daryanto, Mohammad Farid, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Malang: Gaya Media, 2013), 129.

a. Siswa

Siswa merupakan klien utama yang harus dilayani, karena siswa harus dilibatkan secara aktif dan tepat, tidak hanya di dalam pembelajaran melainkan juga kegiatan sekolah. Wahana yang paling tepat untuk melibatkan para siswa adalah kegiatan-kegiatan diluar kurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler.⁶⁸ Kegiatan ekstrakurikuler juga membutuhkan dana, untuk itu diperlukan anggaran tersendiri agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik demi perbaikan mutu sekolah tersebut.

b. Guru

Guru merupakan bagian integral dari keberadaan sumberdaya manusia yang mempunyai peranan strategis dalam kehidupan suatu sekolah. Oleh sebab itu agar tugas pembinaan bagi para guru oleh kepala sekolah dapat dilaksanakan secara efektif maka ruang lingkup atau dimensi-dimensi kepegawaian perlu dipahami oleh setiap kepala sekolah.⁶⁹ Adanya keseragaman dalam pola penggajian guru menjadi salah satu syarat untuk memacu peningkatan mutu proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah sebagaimana yang digagas dalam konsep MBS, tentu saja kesejahteraan tidak identik dengan kesejahteraan finansial. Standar gaji, tunjangan fungsional dan kesejahteraan material lain yang di perjuangkan guru-guru adalah realitas.⁷⁰

⁶⁸ Mulyono, *Mewujudkan Madrasah Unggul*, Vol. 11, Nomor 1, Juli 2009, 3.

⁶⁹ *Ibid.*, 3.

⁷⁰ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan...*, 35.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan, yaitu: pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, dan kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar.⁷¹ Sedangkan prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: pertama: prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, dan kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar.⁷²

Sarana dan Prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran. Sedangkan prasarana ialah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar disebuah lembaga pendidikan seperti jalan menuju madrasah, halaman madrasah, dan tata tertib sekolah. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan merencanakan kebutuhan, pengadaan investasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan hingga penataan halaman, bangunan, perlengkapan dan perabot madrasah secara tepat guna dan tepat sasaran.

⁷¹ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 3.

⁷² *Ibid.*, 3.

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar hanya akan terjadi secara efektif bila mana dikelola dengan manajemen yang tepat. Selama ini peningkatan mutu pendidikan cenderung melalui manajemen sentralistik. Begitu banyak program peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar ditetapkan dan diupayakan secara sentralistik oleh pemerintah pusat. dan beragam program pelatihan guru dilaksanakan secara terpusat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.⁷³ Keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu merupakan tantangan bagi pihak penyelenggara pendidikan. Mutu tidak akan habis-habisnya dibicarakan dan dituntut oleh masyarakat.

Efektifitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi, program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tetapi juga waktu, dan amat penting menyeleksi penggunaan dan operasional, pemeliharaan dan biaya-biaya lain yang mengarah pada pemborosan.

Tindak lanjut manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu adanya pengalokasian dana pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yang memerlukan anggaran yang lebih besar dalam meningkatkan mutu pendidikan . Dengan adanya anggaran dana yang dialokasikan untuk proses pembelajaran diharapkan dapat menunjang semua kegiatan di madrasah tersebut demi peningkatan mutu pendidikan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Asfila Murniati A.R. dan Nasir Usman dengan judul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada MTs Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*. Tujuan penelitian, memahami bagaimana pelaksanaan pembiayaan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran pada MTs Negeri Janarata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisa data meliputi reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan prefikasi. Subyek penelitian: kepala sekolah, waka, guru dan bendahara. Hasil penelitian: perencanaan pembiayaan pendidikan pada MTs N Janarata dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan seluruh personil sekolah. Teknik pengalokasian pembiayaan pendidikan berdasarkan pada standar yang diprioritaskan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, pengawasan pembiayaan dilakukan secara intern oleh kemenag bidang keuangan dan ekstern oleh BPKP.⁷³

Penelitian yang dilakukan oleh Ernie Widyastuti, mahasiswa Program Pascasarjana Jurusan Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan (Studi Situs di SMA Negeri Punung Pacitan)*. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan sumber-sumber dana pendidikan di SMA Negeri Punung, (2) Untuk mendeskripsikan alokasi dan realisasi pembiayaan

⁷³Asfila Murniati A.R. dan Nasir Usman, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran ada MTs Negeri Janarata Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal administrasi Pendidikan r-ISSN:2302-0156, 2016.

pendidikan di SMA Negeri Punung, (3) Untuk mendeskripsikan karakteristik pertanggungjawaban dana pendidikan di SMA Negeri Punung. Penelitian ini penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi. Hasil penelitian, sumber pendapatan di SMA Negeri Punung tercantum dalam RAPBS. Sumber pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah melalui APBN, Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi, dan APBD kabupaten Pacitan. Selain dari Pemerintah, masyarakat dan wali murid mempunyai partisipasi yang besar terhadap pendanaan sekolah. Alokasi dana untuk pembiayaan pendidikan secara umum bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan.⁷⁴

Penelitian yang dilakukan Heru Prasetya, mahasiswa pascasarjana jurusan Magister Manajemen Pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Pengelolaan Keuangan Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik (1) perencanaan dan alokasi dana di Sekolah Dasar Negeri 2 Laweyan Surakarta, (2) Pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data bertata dalam situs untuk diskripsi. Hasil penelitian: (1) Perencanaan keuangan

⁷⁴Ernie Widyastuti, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan (Studi Situs di SMA Negeri Punung Pacitan)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Salatiga, 2012).

merupakan kegiatan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang, melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun, menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan, melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan, menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah, (2) Pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai pengguna dana diwajibkan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada sumber dana, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan wali murid.⁷⁵

Penelitian yang dilakukan Windarti, dalam Jurnal Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul Pengaruh Karakteristik Pengelolaan Keuangan Sekolah dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada SMA dan SMK Negeri di Kota Madiun. Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaruh karakteristik pengelolaan keuangan sekolah dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik pengelolaan keuangan sekolah dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Tingkat pendidikan dan pengalaman berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Latar belakang pendidikan, usia, dan

⁷⁵ Heru Prasetya, *Pengelolaan Keuangan Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Surakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

gander terbukti tidak mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.⁷⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ulpha Lisni, Azhari, dan dedi Ahmad Karmiady Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mahasiswa dengan judul Manajemen pembiayaan Pendidikan, Fasilitas pembelajaran dan Mutu Sekolah. Fokus penelitian: bagaimana apakah terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. Metode penelitian: metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis: analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian: pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan dan pengemasan pembiayaan, sedangkan pada prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah.⁷⁷

Penelitian-penelitian di atas lebih menitikberatkan pada masalah pengelolaan pembiayaan atau keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan saja serta belum menyentuh pada peningkatan mutu pendidikan.

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengembangan 8 Standart

⁷⁶ Windarti, "Pengaruh Karakteristik Pengelolaan Keuangan Sekolah dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada SMA dan SMK Negeri di Kota Madiun", .Assets Jurnal Akuntansi dan pendidikan, Vol. 4 nomor 1, April 2005 .

⁷⁷ Ulpha Lisni, Azhari dan Dedi Ahmad Karmiady, Manajemen Peembiayaan, fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah, Jurnal Administrasi pendidikan, VO. XXIII No. 2 Tahun 2016.

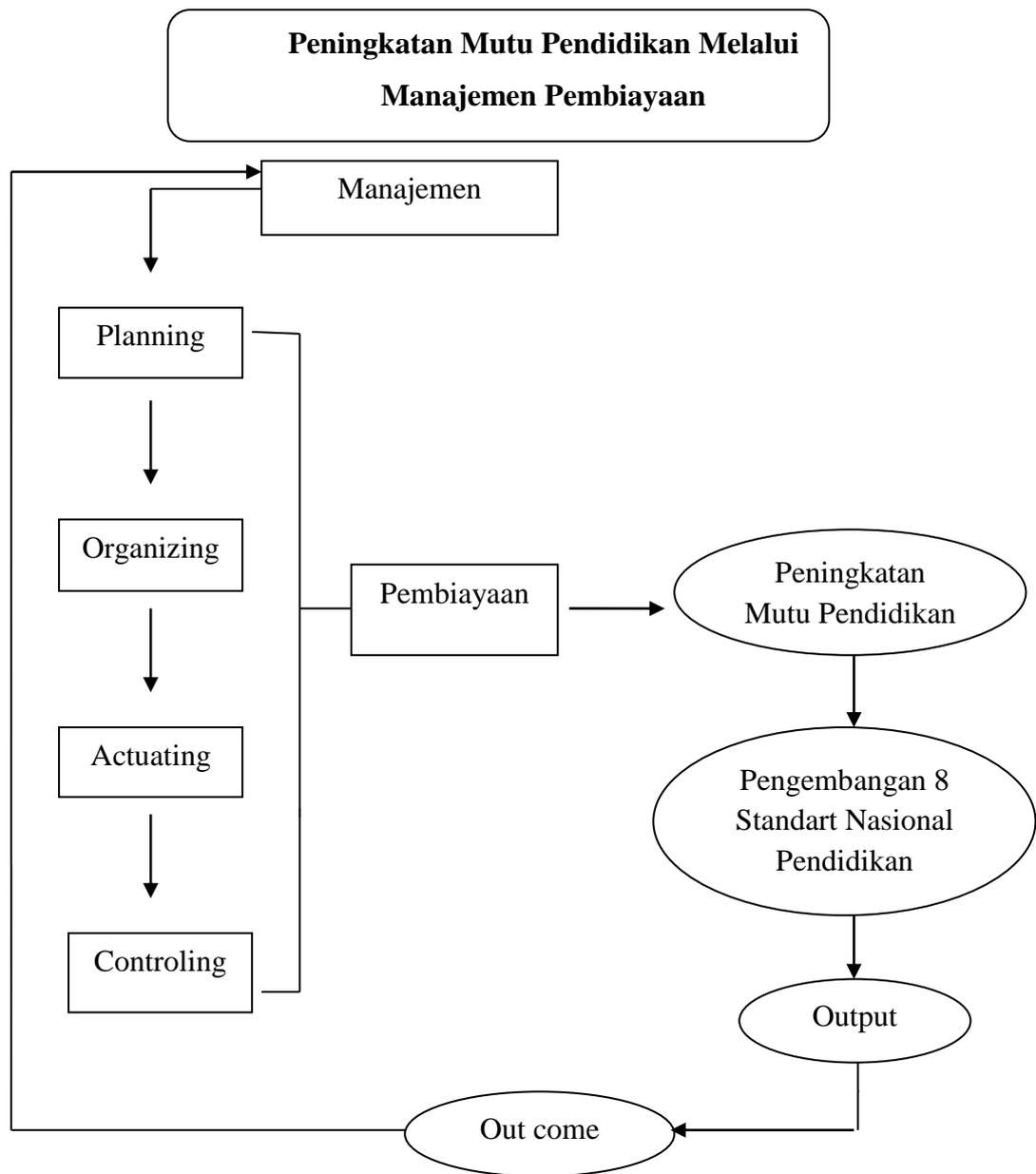
Nasional Pendidikan. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri II mampu membawa lembaganya sampai tingkat nasional dan dinobatkan sebagai sekolah riset, sedangkan Madrasah Tsanawiyah Kanigoro Kediri mampu meraih prestasi sebagai sekolah Adiwiyata tingkat Nasional.

Peneliti ingin mengetahui manajemen pembiayaan yang dilakukan leader kedua sekolah tersebut dalam mengelola lembaganya sehingga mampu meraih sekolah berpredikat nasional

C. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori.⁷⁸ Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma alamiah (naturalistik) yang bersumber dari pandangan fenomenologis, mengingat bahwa penelitian ini dilakukan untuk mencari pemahaman tentang sebuah fenomena dengan memfokuskan pada sebuah kondisi alamiah sehingga tidak terikat oleh variabel. Adapun alur pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut:

⁷⁸ Puspowarsito, *Metode Penelitian Dengan Aplikasi Program SPSS*, (Bandung: Buah Batu, 2008), 14.



Gambar 2 Paradigma Penelitian

Konsep dasar yang menjadi pijakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen pembiayaan. Konsep dasar ini yang menjadi acuan bagi peneliti untuk menggali informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang diterapkan oleh Kepala Sekolah di MTs Negeri Kediri II dan MTs

Negeri Kanigoro Kediri pada peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen pembiayaan.